

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK
TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB)**

Risma Diri Artha ¹

Prayitno Basuki ²

Alamsyah MT. ²

¹ Inspektorat Provinsi NTB

²Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram

rismarpaung@gmail.com

Abstract

This study aimed to examined the effect of the characteristics of the local government and BPK audit findings on the performance of the regional administration of the district/city governments in West Nusa Tenggara Province in 2011-2013. Data were collected by using documentation technique and literature. Tests carried out using multiple linear regression test against all regencies/cities in NTB Province which amounted to 10 (ten) Regency/City among others, West Lombok, Central Lombok, East Lombok, North Lombok, Sumbawa, West Sumbawa, Dompu, Bima, Bima and Mataram. The results showed that the level of regional wealth, the degree of dependence on the central government, capital expenditures, leverage and audit findings of no significant effect on the performance of the regional administration, while the size of the local government have a significant effect on the performance of the regional administration in the direction of a positive relationship.

Keywords: Government Performance Report, Evaluation for government performance, Characteristics of Local Government, Audit Finding

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2011-2013. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi linear berganda terhadap seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang berjumlah 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, belanja modal, leverage dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.

Kata Kunci : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja, Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32/2004). Dengan adanya otonomi daerah, aspirasi masyarakat akan lebih mudah disalurkan dan dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bergman dan Lane (1990) dalam Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Mardiasmo (2009:20) menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, informasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada masyarakat. Selanjutnya sinyal tersebut akan diinterpretasikan sebagai sinyal yang baik (*good news*) atau sinyal yang buruk (*bad news*) oleh masyarakat. Evans dan Patton (1987) menyatakan bahwa dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat. Teori *signalling* menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap keputusan masyarakat dalam

mendukung pemerintah yang sedang berjalan.

Disamping memberikan kewenangan otonomi kepada Pemerintah Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 juga mewajibkan tiap Kepala Daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya LPPD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah tersebut akan dievaluasi oleh Pemerintah Pusat. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD dibantu oleh Tim Teknis Daerah. Metode EKPPD dilakukan dengan cara menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya hasil dari EKPPD tersebut merupakan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil EKPPD Tahun 2011-2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap 10 (sepuluh) Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota memperoleh rata-rata skor kinerja dengan status tinggi. Kemudian dari sisi peringkat, dapat diketahui bahwa semua Pemda Kabupaten/Kota memperoleh peringkat di bawah 10 secara Nasional sehingga sampai saat ini belum ada yang

mendapat penghargaan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi NTB masih belum maksimal dan memerlukan peningkatan sehingga daya saing Pemda menjadi lebih tinggi.

Beberapa penelitian yang mengaitkan karakteristik pemda dengan kinerja pemda antara lain dilakukan oleh Coll *et al.* (2006) dalam Budianto (2012), Sumarjo (2010), Lin *et al.* (2010), Mustikarini dan Fitriasari (2012), Nugroho (2012), Julitawati *et al.* (2012), Wenny (2012), Kusumawardani (2012) dan Sudarsana (2013). Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan bahwa isi dari LPPD Pemda Kabupaten/Kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawab dan karakteristik dari masing-masing pemda tersebut. Karakteristik pemda dapat dijelaskan dengan menggunakan beberapa proksi antara lain ukuran (*size*) pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, belanja modal dan *leverage*. Kelima karakteristik di atas merupakan komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemda yang wajib diaudit oleh BPK.

Kinerja pemda dipengaruhi oleh ukuran (*size*) daerah ditemukan oleh sejumlah peneliti, antara lain oleh Sumarjo (2010), Kusumawardani (2012), Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan Budianto (2012). Hal ini berbeda dengan Sudarsana (2013) yang menyatakan bahwa ukuran (*size*) daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Selain dipengaruhi oleh ukuran (*size*) pemda, kinerja pemda juga dipengaruhi tingkat kekayaan daerah sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Lin *et al.* (2010), Julitawati *et al.* (2012), Wenny (2012), Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan Sudarsana (2013). Sementara hasil penelitian Coll *et al.* (2006) dalam Budianto (2012) dan Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap kinerja pemda sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh Coll *et al.* (2006) dalam Budianto (2012) dan Julitawati *et al.* (2012), sedangkan hasil penelitian Sudarsana (2013) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Selanjutnya hasil penelitian Nugroho (2012) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemda, sedangkan penelitian Sudarsana (2013) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda. Kemudian hasil penelitian Sumarjo (2010) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja pemda, sedangkan hasil penelitian Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013). Penelitian ini dilakukan kembali karena masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu atau terjadi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian Sudarsana (2013) yaitu variabel karakteristik pemerintah daerah dan variabel temuan audit BPK. Variabel karakteristik pemerintah daerah diproksikan dengan ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan belanja modal. Selain itu, peneliti juga menambahkan proksi lain yang termasuk dalam variabel karakteristik pemerintah daerah yaitu *leverage*. Penambahan proksi *leverage* ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil penelitian terdahulu dan dikarenakan pada penelitian terdahulu belum ada yang mengaitkan *leverage* dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rumusan hipotesis penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

Ukuran Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pemegang amanah (agent) memiliki tujuan utama dalam melaksanakan program kerja yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai pemberi amanah (principal). Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menurut Sumarjo (2010), pelayanan yang baik dapat diberikan Pemda jika didukung dengan aset yang baik pula. Mustikarini dan Fitriasaki (2012) menyatakan semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut.

Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar akan dituntut untuk memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran kecil. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Kusumawardani (2012) serta Budianto (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran (size) Pemda yang diukur dengan total aset berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah Ukuran Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah PAD (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo, 2010). Adapun pertimbangan tingkat kekayaan diukur dengan PAD karena merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari pengelolaan sumber daya pada daerah tersebut. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah (Florida, 2007 dalam Nugroho, 2012). Saragih (2003) dalam Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro.

Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) menyebutkan bahwa peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik, dimana kualitas layanan publik yang baik terhadap masyarakat (*principal*) akan mencerminkan kinerja yang baik dari suatu Pemda (*agent*).

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Wenny (2012), serta Sudarsana (2013) yang menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda. Julitawati *et al.* (2012) juga menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis kedua sebagai berikut : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tingkat Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat

Disamping ukuran dan tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan keuangan Pemda Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan DAU. PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2001). Walaupun penggunaan DAU ditetapkan oleh Pemda, namun dalam penggunaannya harus mengacu pada tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu dengan semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu Pemda, maka Pemerintah Pusat akan lebih memantau pelaksanaan dari

alokasi DAU dibandingkan dengan Pemda yang lebih sedikit menerima DAU.

Hal ini memotivasi Pemda untuk memiliki kinerja yang lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pula pelayanan yang diberikan Pemda (*agent*) kepada masyarakat (*principal*), sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Sumarjo (2010) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia dan penelitian Ahmad (2011) yang menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro. Begitu pula dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang membuktikan bahwa tingkat ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut : Tingkat Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Belanja Modal

Selain beberapa karakteristik sebelumnya yang berkaitan dengan kekayaan dan pendapatan Pemda, maka karakteristik berikut ini akan dilihat dari sisi belanja Pemda yaitu belanja modal. Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal biasanya terkait erat dengan investasi Pemda yaitu penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Belanja modal yang besar merupakan cerminan

dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemda (*agent*) akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*principal*) sehingga kinerja daerah akan lebih baik.

Hal ini dipertegas oleh penelitian Purba (2006) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah serta penelitian Sjoberg (2003) dalam Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi dengan kinerja ekonomi makro di Swedia selama kurun waktu 1960-2001. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis keempat sebagai berikut : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Leverage

Menurut Mulyadi (2010:108), rasio utang (*leverage ratio*) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio-rasio tersebut akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Beberapa penelitian mengenai *leverage* telah dilakukan antara lain oleh Weill (2003), Sudarmadji dan Sularto (2007), Perwitasari (2010) dan Sumarjo (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Weill (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *leverage* dengan pengukuran kinerja suatu entitas. Hasil penelitian Perwitasari (2010) pada sektor publik menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas, maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa entitas tersebut tidak mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan dana dari pihak eksternal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis kelima sebagai berikut : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Temuan Audit

Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak *agent* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). *Information asymmetry* ini memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh *agent*. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pemda harus diawasi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditemukan BPK atas pemeriksaan LKPD pemda.

Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja Pemda tersebut. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Bernstein (2000) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengukuran kinerja Pemda dengan sistem pengawasan, termasuk audit kinerja dan evaluasi program. Begitu juga dengan hasil penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), Sudarsana (2012) serta Budianto (2012) yang membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan hipotesis keenam sebagai berikut : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan memperoleh data dalam bentuk angka. Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan), penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif karena menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih atau dengan kata lain bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih

(Sugiyono, 2013:89). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2013:37), hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.

Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 terhadap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun Anggaran 2011-2013. Adapun Pemda tersebut terdiri dari 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima serta 2 (dua) Pemerintah Kota yaitu Kota Bima dan Kota Mataram.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data untuk variabel temuan audit BPK didapatkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I dan II tahun 2011-2013 pada situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu <http://www.bpk.go.id>. Data Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemda terhadap Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2011-2013. Data neraca Pemda untuk mendapatkan total aset, utang, dan ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, DAU, belanja modal, total realisasi pendapatan dan belanja diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Data peringkat skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota didapatkan melalui situs <http://otda.kemendagri.go.id/>.

Variabel Penelitian

Ukuran (*size*) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi (Damanpour, 1991). Penelitian Sudarsana (2013), Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta Sumarjo (2010), ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah total aset yang dimiliki. Penelitian

ini menggunakan *logaritma natural* (Ln) dari total aset seperti pada penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) serta Sudarsana (2013).

Variabel kekayaan daerah dihitung dari PAD dibandingkan dengan total pendapatan (Mustikarini dan Fitriyani, 2012; Sudarsana, 2013). Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dihitung dari Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan (Mustikarini dan Fitriyani, 2012; Sudarsana, 2013).

Variabel belanja modal dihitung dari belanja modal dibandingkan dengan total realisasi belanja (Sudarsana, 2013). Variabel *leverage* dihitung dari total utang dibandingkan dengan jumlah ekuitas dana (Mulyadi, 2010:109). Variabel temuan audit mengukur seberapa besar porsi temuan audit (dalam rupiah) suatu Pemda atas ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibandingkan dengan total realisasi belanja Pemda (Budianto, 2012).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diprosikan dengan skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota. Skor kinerja Pemda Kabupaten/Kota yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemingkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2011-2013 tingkat nasional dengan range nilai 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian *portfolio* secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD tahun 2011-2013 dan penilaian lapangan terhadap prestasi kinerja yang dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah.

Teknik Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data panel. Prosedur analisis yang dilakukan antara lain statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas), dan pengujian hipotesis.

Model Penelitian

Model penelitian terdapat di gambar 1 berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln_TA} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DEPEND} + \beta_4 \text{BM} - \beta_5 \text{LEV} - \beta_6 \text{TEMUAN} + \epsilon$$

Keterangan :

Y : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

ϵ : Koefisien error

Ln_TA : Ukuran daerah

PAD : Tingkat kekayaan daerah

DEPEND : Tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat

BM : Belanja modal

LEV : *Leverage*

TEMUAN : Temuan audit BPK

PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 1,5233 dimiliki oleh Kota Mataram, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 3,1775 Kabupaten Sumbawa. Adapun nilai rata-rata skor kinerja tahun 2011-2013 sebesar 2,4407 dan standar deviasinya sebesar 0,3618. Ukuran daerah (Ln_TA) mempunyai nilai minimum sebesar 26,6021 dimiliki oleh Kabupaten Lombok Utara, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 28,5896 dimiliki oleh Kota Mataram. Nilai rata-rata ukuran daerah tahun 2011-2013 sebesar 2,7969 dan standar deviasinya sebesar 0,4924.

Tingkat kekayaan daerah (PAD) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0251 dimiliki oleh Kota Bima, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,2184 dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Nilai rata-rata tingkat kekayaan daerah tahun 2011-2013 sebesar 0,0803 dan standar deviasinya sebesar 0,0440. Tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat (DEPEND) mempunyai nilai minimum sebesar 0,4066 dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,7212 dimiliki

oleh Kabupaten Dompu. Nilai rata-rata tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat tahun 2011-2013 sebesar 0,6240 dan standar deviasinya sebesar 0,0709.

Belanja modal (BM) mempunyai nilai minimum sebesar 0,1180 dimiliki oleh Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,3386 dimiliki oleh Kabupaten Sumbawa Barat. Nilai rata-rata belanja modal tahun 2011-2013 sebesar 0,2109 dan standar deviasinya sebesar 0,0628. *Leverage* (LEV) mempunyai nilai minimum sebesar 0,00005 dimiliki oleh

Kabupaten Sumbawa, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,07523 dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur. Nilai rata-rata *leverage* tahun 2011-2013 sebesar 0,01397 dan standar deviasinya sebesar 0,01963. Temuan audit BPK (Temuan) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0001 dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0,0361 dimiliki oleh Kota Bima. Nilai rata-rata temuan audit BPK tahun 2011-2013 sebesar 0,0071 dan standar deviasinya sebesar 0,0087.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	30	1.5233	3.1775	2.4407	.3618
Ln_TA	30	26.6021	28.5896	2.7969	.4924
PAD	30	.0251	.2184	.0803	.0440
DEPEND	30	.4066	.7212	.6240	.0709
BM	30	.1180	.3386	.2109	.0628
LEV	30	.00005	.07523	.01397	.01963
Temuan	30	.0001	.0361	.0071	.0087

Sumber : Olah Data SPSS

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas akan dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,680 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p = 0,744 > \text{dari } 0,05$). Hal ini berarti H_0 diterima atau dapat disimpulkan data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat angka *Collinearity Statistics* yang ditunjukkan oleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Hasil besaran korelasi antar variabel independen menunjukkan bahwa hanya variabel PAD yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel DEPEND dengan tingkat korelasi sebesar 0,669 atau sekitar 66,9%. Oleh karena korelasi ini masih di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

Hasil perhitungan nilai *Tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel

independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Run Test. Hasil uji Run Test menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,06651 dan tidak signifikan pada 0,05 (karena $p = 0,577 > \text{dari } 0,05$). Hal ini berarti H_0 yang menyatakan residual (res_1) random (acak) diterima atau dengan kata lain tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan

residualnya SRESID. Grafik scatterplots menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan masukan variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, belanja modal, *leverage* dan temuan audit BPK.

Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis

Berikut ini merupakan hasil pengujian model penelitian dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) pada program aplikasi Eviews 8. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui nilai koefisien, standard error, nilai t-statistik dan probabilitasnya untuk setiap variabel independen. Selain itu juga terdapat nilai koefisien determinasi (R²) untuk melihat kemampuan model regresi secara keseluruhan.

Tabel 2. Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Ln_TA	0.066205	0.031771	2.083795	0.0480
PAD	2.095903	1.887017	1.110697	0.2777
DEPEND	0.624287	1.106698	0.564099	0.5779
BM	-0.155936	0.756932	-0.206011	0.8385
LEV	-0.277379	3.486901	-0.079549	0.9373
TEMUAN	11.95693	5.816680	2.055627	0.0509
Weighted Statistics				
R-squared	0.213535	Mean dependent var	3.722456	
Adjusted R-squared	0.049689	S.D. dependent var	3.030057	
S.E. of regression	0.355359	Sum squared resid	3.030727	
Durbin-Watson stat	2.325430			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.081464	Mean dependent var	2.440727	
Sum squared resid	3.487578	Durbin-Watson stat	2.877464	

Sumber : Olah Data Eviews

Uji Koefisien determinasi (R²) berguna untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R² (R-squared) yang dihasilkan adalah sebesar 0,21, sehingga koefisien determinasinya adalah sebesar 21%. Nilai ini memiliki arti bahwa pengaruh variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat, belanja modal, *leverage* dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara simultan adalah sebesar 21%, sedangkan sisanya sebesar 79% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model/persamaan ini. Dengan kata lain, variabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada

pemerintah pusat, belanja modal, *leverage* dan temuan audit BPK adalah sebesar 21%, sementara pengaruh yang disebabkan oleh faktor/variabel lain di luar model adalah sebesar 79%.

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2 di atas didapatkan bahwa ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai koefisien variabel sebesar 0,066205 menunjukkan adanya hubungan positif, yang berarti jika aset daerah naik sebesar 1% maka skor kinerja akan naik sebesar 0,06%.

Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai koefisien variabel sebesar 2,095903 menunjukkan adanya hubungan yang positif, yang berarti jika PAD naik

sebesar 1%, maka skor kinerja akan naik sebesar 2,09%. Karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka analisis mengenai uji arah sebenarnya tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai koefisien variabel sebesar 0,624287 menunjukkan adanya hubungan yang positif, yang berarti jika DAU naik sebesar 1%, maka skor kinerja akan naik sebesar 0,62%. Karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka analisis mengenai uji arah sebenarnya tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai koefisien variabel sebesar -0,155936 dimana tanda minus (-) menunjukkan adanya hubungan yang negatif, yang berarti jika belanja modal naik sebesar 1%, maka skor kinerja akan turun sebesar 0,15%. Karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka analisis mengenai uji arah sebenarnya tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai koefisien variabel sebesar -0,277379 dimana tanda minus (-) menunjukkan adanya hubungan yang negatif, yang berarti jika *leverage* naik sebesar 1%, maka skor kinerja akan turun sebesar 0,27%. Karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka analisis mengenai uji arah sebenarnya tidak diperlukan lagi.

Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa temuan audit BPK tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nilai koefisien variabel sebesar 11,95693 menunjukkan adanya hubungan yang positif, yang berarti jika temuan audit BPK naik sebesar 1%, maka skor kinerja akan naik sebesar 11,95%. Karena tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel belanja modal dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka analisis mengenai uji arah sebenarnya tidak diperlukan lagi.

Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi pada tabel 2, dapat diketahui bahwa ukuran daerah memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,066205 dan nilai signifikansi (prob) sebesar 0,0480 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti hipotesis satu diterima. Artinya bahwa variabel ukuran daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif pada tingkat keyakinan 95%. Hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin besar ukuran daerah, maka semakin baik kinerja pemda tersebut. Ukuran daerah yang besar akan mempermudah dalam kegiatan operasional dan pemberian pelayanan yang memadai kepada masyarakat.

Kemudahan dalam melaksanakan kegiatan operasional juga akan mendukung kelancaran perolehan PAD yang sangat berguna untuk kemajuan dan pembangunan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja pemda. Selain itu, pemda dengan ukuran yang besar akan memiliki tekanan dan dorongan yang besar untuk memberikan sinyal yang bersifat *good news* yaitu laporan tentang baiknya kinerja pemda sehingga akan meningkatkan skor kinerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Mustikarini dan Fitriyani (2012), Kusumawardani (2012) serta Budianto (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap

kinerja pemda atau dengan kata lain semakin besar ukuran daerah, maka akan semakin baik kinerja pemda tersebut.

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi pada tabel 2, dapat diketahui bahwa tingkat kekayaan daerah memiliki koefisien regresi positif sebesar 2,095903 dan nilai signifikansi (prob) sebesar 0,2777 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti hipotesis dua ditolak. Artinya bahwa variabel tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif. Variabel tingkat kekayaan daerah diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan.

Hasil ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum mampu membiayai pembangunan daerah secara mandiri. Artinya bahwa pemerintah daerah masih tergantung kepada Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga tidak memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dana untuk mengatasi permasalahan di daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Coll *et al.* (2006) dalam Budianto (2012) dan Kusumawardani (2012) yang menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi pada tabel 2, dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,624287 dan nilai signifikansi (prob) sebesar 0,5779 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti hipotesis tiga ditolak. Artinya bahwa variabel tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.

Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada Dana Alokasi Umum yang (DAU) yang menyumbang lebih dari 60% pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, porsi DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan program dan rencana kerja daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka desentralisasi.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar diduga lebih banyak untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kurang memadai. Masalah lainnya terkait adanya SILPA atau sisa anggaran Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran yang disebabkan karena tidak terserapnya anggaran belanja daerah sehingga walaupun anggaran telah disediakan namun tidak digunakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bersangkutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah

pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi pada tabel 2, dapat diketahui bahwa belanja modal memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,155936 dan nilai signifikansi (prob) sebesar 0,8385 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti hipotesis empat ditolak. Artinya bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang negatif.

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Pemerintah daerah mengalokasikan dana berupa anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Kondisi dimana masih rendahnya alokasi belanja modal dalam APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB mengakibatkan sarana dan prasarana publik yang tersedia kurang memadai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi pada tabel 2, dapat diketahui bahwa *leverage* memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,277379 dan nilai signifikansi (prob) sebesar 0,9373 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti hipotesis lima ditolak. Artinya bahwa variabel *leverage* tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang negatif.

Rasio utang (*leverage ratio*) sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengukur seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang. *Leverage* dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan total utang terhadap jumlah ekuitas dana.

Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB memiliki utang jangka pendek terdiri dari utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang pemotongan pajak pusat, utang bunga dan utang jangka pendek lain. Adapun utang jangka panjang yang dimiliki terdiri dari pinjaman kepada pihak ketiga, pendapatan diterima di muka. Akan tetapi dari segi perbandingan utang terhadap ekuitas, nilainya tidak terlalu besar atau dengan kata lain dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang cukup tinggi sehingga tidak mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemda.

Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan pada hasil pengujian regresi pada tabel 2, dapat diketahui bahwa temuan audit BPK memiliki koefisien regresi positif sebesar 11,95693 dan nilai signifikansi (prob) sebesar 0,0509 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti hipotesis enam ditolak. Artinya bahwa variabel temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.

Temuan audit BPK yaitu kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian

intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan berlaku atas pemeriksaan laporan keuangan Pemda yang dilakukan BPK. Hasil pemeriksaan BPK tersebut dapat berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Temuan audit BPK dalam penelitian ini diukur dengan jumlah temuan audit (dalam rupiah) suatu Pemda atas ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang - undangan dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah Pemda. Hasil penelitian dimana temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diduga karena rekomendasi atas hasil pemeriksaan tersebut cepat ditindaklanjuti oleh pemda Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB sehingga tidak berpengaruh dalam pelaksanaan tugas atau urusan pemerintahan.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, belanja modal, *leverage* dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.

Implikasi Penelitian

Pemda dengan ukuran yang besar diharapkan agar lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki demi meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada seluruh praktisi terutama pemda selaku pelaksana dan pengambil kebijakan di daerah untuk lebih meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga akan meningkatkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan peringkat kinerja secara nasional.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang dengan menambahkan proksi lain dari karakteristik pemda seperti rasio efektivitas, efisiensi, likuiditas, dan solvabilitas. Disamping itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel/faktor lain yang bersifat non keuangan seperti jumlah penduduk, jumlah pegawai dan jumlah anggota DPRD sehingga hasil penelitian lebih representatif. Penelitian ini hanya menguji pada tingkat pemda Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan data Pemda pada tingkat provinsi. Kemudian variabel temuan audit BPK dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan hasil temuan berupa nilai temuan, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel temuan audit BPK berupa jumlah kasus atau tindak lanjut hasil temuan audit BPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Ahmad, Irdam. 2011. Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy. *Economic Journal of Emerging Markets*.
- Ardhani. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan*. Jurnal hal 9-11: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan II Tahun 2011-2013*. <http://www.bpk.go.id> diakses pada 21 Februari 2015.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.

- Bernstein, J David. 2000. *Local government measurement use to focus on performance and results. Evaluation and Program Planning 24 (2001) 95-101.* USA.
- Budianto, Wendy. 2012. *Pengaruh Opini, Temuan Audit Dan Gender Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2008-2010.* FE UI. Depok.
- Damanpour, F. 1991. *Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators.* Academy of Management Journal, Vol. 34: 555-590.
- Darwanto, dan Yustikasari, Y. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah : Implementasi Pasca Reformasi.* RMBOOKS. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Edisi Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halachmi, Arie. 2005. *Performance Measurement is Only One Way of Managing Performance.* International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54: 502-516.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik "Akuntansi Keuangan Daerah".* Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah.* Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik. : Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Revisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. dan Syukriy Abdullah. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali.* Jurnal Ekonomi STEI 2 (25) _____.
- _____. 2009. *Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi.* Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1) : 53-64.
- Hasibuan, Abdul Nasser. 2009. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.* Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Jensen, Michael C and William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure.* Journal of Financial Economics 3 (4) : 305-360.
- Julitawati, et al. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Banda Aceh.* Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Kementerian Dalam Negeri RI. 2011. *Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional.* <http://otda.kemendagri.go.id/> diakses pada 3 Maret 2015.
- _____. 2012. *Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional.* <http://otda.kemendagri.go.id/> diakses pada 3 Maret 2015.
- _____. 2013. *Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Berdasarkan LPPD Tingkat Nasional.*

- Pemerintahan Kabupaten/Kota. Daerah
_____ 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Perwitasari, Citra. 2010. *The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purba, Adearman. 2006. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun*. USU. Medan.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik : Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Robbins, Walter A., Austin, Kenneth R. *Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure*. Journal of Accounting Research, 24 (2) : 412-421.
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. USU. Medan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Setiawan, Wahyu 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. FE Universitas Diponegoro.
- Sjoberg, Peter. 2003. *Government Expenditure Effect on Economic Growth: The Case of Sweden 1960-2001*. Lulea University of Technology.
- Stanbury, W.T. 2003. *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Fraser Institute Digital Publication. Canada.
- Stiglitz, Joseph E. 1999. *Principal And Agent*. Dalam Newman, Peter, Murray Milgate, and John Eatwell (Eds.). 1994. *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*. The Macmillan Limited. London.
- Sudarmadji, Ardi Murdoko and Lana Sularto. 2007. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan*. Proceeding Psychology, Economy, Art, Architect and Civil. Gunadarma University.
- Sudarsana, Hafidh Susila. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities*. Journal Public Policy January 2010.
- _____, Hartoko, Sri, Retnoningsih, Hilda, Rusmin, Mandasari, Putriesti and Brown, Alistair. 2010. *Influence of Parliament Characteristics toward Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia*. Hibah Penelitian Publikasi Internasional LP2M UNS.
- _____, Yulianingtyas, R. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah*

- Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8. No. 1: 30-42.
- Saragih., Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia..* Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Ulum MD, Ihyaul. 2009. *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar.* Bumi Aksara. Jakarta.
- Wenny, Cherrya Dhia. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan.* Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol. 2 (1) : 39-51.